

**Judul** : Independensi Kepemimpinan Baru OJK Diuji  
**Tanggal** : Jumat, 13 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1-15

# Independensi Kepemimpinan Baru OJK Diuji

OJK akan memulihkan kepercayaan jasa keuangan, terutama di pasar modal. Upaya ini mencakup reformasi integritas pasar modal dalam delapan aksi prioritas.

**JAKARTA, KOMPAS** — Era kepemimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan memprioritaskan strateginya pada stabilitas sektor jasa keuangan, pemulihan kepercayaan, serta pendalaman pasar. Di sisi lain, OJK diharapkan dapat tetap mempertahankan marwahnya sebagai otoritas independen.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (12/3/2026), sidang dewan menyetujui laporan hasil

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

**>> BACA JUGA:**

## Calon Pejabat OJK Janjikan Kontribusi bagi Perekonomian

Para kandidat anggota Dewan Komisiner OJK mengusung tema besar kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional. **KOMPASID**

[komp.as/janjikankontribusi](http://komp.as/janjikankontribusi)

## Jajaran Pimpinan OJK Periode 2026-2031

### Friderica Widayarsi Dewi

Ketua Dewan Komisiner

**Jabatan sebelumnya**

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK



### Hernawan Bakti Sasongko

Wakil Ketua Dewan Komisiner

### Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

### Dicky Kartikoyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

### Adi Budiarmo

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

### Jabatan sebelumnya

Anggota Badan Supervisi OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya Kementerian Keuangan

Sumber: Pemberitaan Kompas, Berita Citra, dan Kompas.com

FOTO: YULI ENRIK DEWATI/ISTOCK



## Independensi

(Sambungan dari halaman 1)

uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisiner OJK periode 2026-2031 oleh Komisi XI DPR.

Lima calon anggota Dewan Komisiner OJK yang telah dipilih ialah Friderica Widyaningrum Dewi sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMJK) OJK.

Kemudian, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK dan Adi Budiarto sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK.

Ketua Komisi XI Mukhammad Misbakhun menyampaikan, terpilih lima anggota Dewan Komisiner tersebut dapat membawa OJK menjadi lembaga yang lebih kredibel, dipercaya oleh masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia ke depan.

"Harapan kami, para komisiner, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisiner OJK bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap OJK, terhadap pasar modal Indonesia, dan terhadap industri jasa keuangan Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna DPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), hasil keputusan penetapan DPR tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui keputusan presiden.

Selanjutnya, para anggota Dewan Komisiner OJK yang telah ditetapkan akan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Marwah independensi

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Ce-lios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, anggota Dewan Komisiner yang telah terpilih mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan marwah dan integritas OJK.

Dalam hal ini, OJK merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakannya tugas dan wewenangnya. Marwah tersebut secara eksplisit

tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang kembali dipertegas dalam UU P2SK.

"Di tengah situasi konflik Timur Tengah, dan tekanan sektor jasa keuangan yang meningkat, OJK perlu mempertahankan independensi dari tarik-menarik kepentingan politik praktis," ujar Bhima.

Ia mengingatkan, proses revisi UU P2SK yang masih berlangsung saat ini berisiko mengganggu independensi OJK. Salah satunya terkait dengan usulan evaluasi terhadap pengurus OJK yang dapat berujung pemberhentian oleh DPR.

"Regulator harusnya menjadi wasit yang mengingatkan sektor keuangan apabila pembiayaan memiliki risiko terhadap program pemerintah. Apalagi, tekanan *cost of fund* akan naik karena inflasi dari harga minyak dunia," ujar Bhima.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekono-mis dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafni, menyoroti perihal tata kelola administrasi dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisiner OJK, terutama perihal durasi masukan publik yang telah dipangkas 12 hari.

"Keputusan yang diambil di atas prosedur yang cacat hukum rentan digugat secara tata usaha negara (PTUN), yang justru akan menciptakan ketidakpastian baru di sektor keuangan," katanya.

### Arah OJK

Di bawah kepemimpinannya, Friderica memiliki beberapa prioritas kebijakan di sektor jasa keuangan. Prioritas utamanya ialah menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika geopolitik global dan risiko dampak rambatannya ke Indonesia.

"Kami akan terus melakukan *assessment* terhadap sektor jasa keuangan kita, ketahanan modalnya, dan lain-lain," ujarnya dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks DPR.

Selanjutnya, OJK akan mengupayakan pemulihan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan, terutama di pasar modal. Upaya ini mencakup reformasi integritas pasar modal yang tertuang dalam delapan aksi prioritas.

Ia menambahkan, pendalaman pasar juga akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan bagi pembangunan ekonomi nasional. Komitmen ini termasuk dengan memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

(AGP)